bank nusamba
bpr nusamba cepiring

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Tahun 2025



Contact me on WhatsApp
08112766651
bpr nusamba cepiring
nusambacepiring.com

BPR Nusamba Cepiring berizin dan diawasi OJK serta merupakan bank peserta penjaminan LPS

bank nusamba
bpr nusamba cepiring

TOP 100 BPR
THEFINANCE
2025

BPR NUSAMBA CEPIRING
MERAIH PENGHARGAAN







JUMAT
20 Juni 2025

Merlynn Park Hotel
Jakarta

TOP 100 BPR
BERASET RP 100 MILIAR KE ATAS
YANG TUMBUH PESAT SELAMA 3 TAHUN

Cek Lurr!

Contact me on WhatsApp
08112766651

bpr nusamba cepiring
nusambacepiring.com

BPR Nusamba Cepiring berizin dan diawasi OJK
serta merupakan bank peserta penjaminan LPS

BPR

bank nusamba
bpr nusamba cepiring

infobank

infobank
16th
BPR
AWARD
2025

BPR NUSAMBA CEPIRING
MERAIH PENGHARGAAN



PLATINUM AWARD
Berpredikat
SANGAT BAGUS

JUMAT
29 Agustus 2025

Hotel Indonesia
Kempinski Jakarta

SELAMA 10 TAHUN TERAKHIR (2015-2024)
ASET 250 MILIAR S.D DI BAWAH 500 MILIAR

Cek Lurr!

Contact me on WhatsApp
08112766651

bpr nusamba cepiring
nusambacepiring.com

AYO to BANK

BPR Nusamba Cepiring berizin dan diawasi OJK
serta merupakan bank peserta penjaminan LPS

BPR

LEMBAR PERSETUJUAN

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor _No.9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR & BPRS serta SEOJK 12 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR serta beberapa ketentuan terkait Penerapan Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat, maka Direksi telah menyusun Laporan tentang Penerapan Tata Kelola pada BPR Nusamba Cepiring, Guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di BPR Nusamba Cepiring .

Laporan ini memuat ruang lingkup pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang telah dilakukan selama tahun 2025 meliputi semua aspek kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi BPR Nusamba Cepiring, namun demikian agar selaras dengan faktor-faktor penilaian yang tercantum dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan harapan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholder* guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar tata kelola, yaitu : transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

Kami yakin masih banyak kekurangan dalam laporan ini sehingga kami mohon kritik dan saran serta pembinaan dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan penerapan tata kelola PT. BPR Nusamba Cepiring dan dapat dipergunakan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Kendal , 10 Maret 2026

PT. BPR NUSAMBA CEPIRING

Bambang Susanto, SE. MM	**Dwi Yono, SE. MM**
Direktur Utama	Komisaris Utama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……. i

PENGHARGAAN/ AWARD……. ii

LEMBAR PERSETUJUAN …… iv

DAFTAR ISI……. v

BAB I PENDAHULUAN…… 1

A. Informasi Umum…… …….. 1

B. Prinsip Dasar Penerapan Tata Kelola …….. …….. 2

C. Visi, Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan Bank ……...…… 3

D. Struktur Organisasi Bank ……..... 4

E. Penerapan Tata Kelola Bank…… 6

BAB II HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA……. 8

A. Self Assesment……...…… …….. 8

B. Kesimpulan Assesment……...…… …….. 9

BAB III TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR …….. 10

A. Ringkasan Hasil Penilaian Self Assesment Atas Penerapan Tata Kelola……....…… ……. 10

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola…..…… . 11

C. Kepemilikan Saham Direksi & Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

D. Hubungan Keuangan Anggota Direksi & Anggota Dewan Komisaris Pada BPR…… 21

E. Hubungan Keluarga Anggota Direksi i & Anggota Dewan Komisaris Pada BPR…… 21

F. Paket / kebijakan Remunerasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS…… 22

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah…….. 22

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Dalam 1 Tahun …….. 23

I. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris…… 27

J. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)…… 28
K. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi…….. 29
L. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan……. 29
M. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial & Politik…… 29

BAB VI PENUTUP ……. 31

DAFTAR TABEL

Tabel	Komposisi Kepemilikan Saham	2
Tabel	Jumlah Karyawan ….	6
Tabel	Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR	8
Tabel	Ringkasan Hasil Penilaian (Assesment)	10
Tabel	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Anggota Direksi	11
Tabel	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris	14
Tabel	Kelengkapan dan Pelaksanaan Komite	19
Tabel	Struktur Keanggotaan, Keahlian, Independensi Anggota Komite ..	20
Tabel	Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	21
Tabel	Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Pada BPR.....	21
Tabel	Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	21
Tabel	Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Pada Perusahaan Lain	21
Tabel	Hubungan Keuangan Anggota Direksi	21
Tabel	Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris.....	22
Tabel	Hubungan Keluarga Anggota Direksi	22
Tabel	Hubungan Keluaga Anggota Dewan Komisaris	22
Tabel	Paket / Kebijakan Remunerasi Direksi & Dewan Komisaris	22
Tabel	Uraian Fasilitas Lain Direksi & Dewan Komisaris.....	23
Tabel	Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	23
Tabel	Rapat Dewan Komisaris	23
Tabel	Kehadiran Rapat Dewan Komisaris	27
Tabel	Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi & Pejabat Bank	27
Tabel	Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	28
Tabel	Permasalahan Hukum Yang Dihadapi.....	29

Tabel Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan 29

Tabel Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik..... 29

DAFTAR GAMBAR

Gambar Struktur Organisasi PT.BPR Nusamba Cepiring..... 5

BAB I

PENJELASAN UMUM

A. INFORMASI UMUM

PT. Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Cepiring (Selanjutnya disebut "Bank") didirikan di Jakarta pada tanggal 29 September 1989 berdasarkan akta nomor 109 dari notaris Abdul Latif. SH Notaris di Jakarta. Izin usaha diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Kep.023/KM.13/1990 tanggal 18 Januari 1990. Bank mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 17 Februari 1990.

Sejalan dengan mandatory POJK No 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perkonomian Rakyat sesuai pasal 147 dimana BPR Wajib melakukan perubahan nomenklatur " Bank Perkreditan Rakyat" Menjadi " Bank Perekonomian Rakyat.

Perijinan yang dimiliki oleh PT. BPR Nusamba Cepiring saat ini adalah :

1. Ijin Prinsip dari Menkeu Nomor: No.Kep.023/KM.13/1990 tanggal 18 Januari 1990
2. Ijin Usaha Nomor: S 1175/MK.13/1989 dikeluarkan di Jakarta oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia tertanggal 27 September 1989
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) No 9120109731925 Tanggal 12 Juli 2019.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor: 01.496.742.6-511.000 dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang terdaftar tanggal 07 April 2008.
5. Keputusan Mentri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU 0000055.AH.01.02. Tahun 2025 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Cepiring.

Pada tahun 2025 tidak terdapat penambahan modal Bank, Penambahan modal yang terakhir pada Tahun 2019, Struktur Permodalan Bank terdapat penambahan modal disetor Bank sebesar Rp. 500.000.000,-. Bank telah mengajukan Permohonan Persetujuan Penambahan Modal Disetor kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 05 Agustus 2019 dengan dilampiri syarat-syarat yang telah ditentukan & dilengkapi berdasarkan Akte Notaris Nomor : 141 Tanggal 31 Juli 2019, Notaris Ny. Djumini Setyodi, SH.Mkn di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI no. AHU- AH.01.03-0308843 Tahun 2019 tanggal 06 Agustus 2019. Melalui surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-416/KR.0313/2019 per tanggal 29 Oktober 2019 telah dicatat dalam Administrasi

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga komposisi kepemilikan modal saham pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel Komposisi Kepemilikan Saham

NO	NAMA	PROSENTASE KEPEMILIKAN	JUMLAH (Rp.)	LEMBAR SAHAM
1	PT. Sentra Modal Harmoni	89.02%	12.115.000.000	121.150
2	PT. Fajar Mas Murni	10.98%	1.495.000.000	14.950
Jumlah Modal Disetor		**100.00%**	**13.610.000.000**	136.100

B. PRINSIP DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang pelaksanaan penerapan tata kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat & Bank Perekonomian Rakyat Syariah, maka Bank terus berupaya mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan.

Memperhatikan literatur yang ada, penerapan tata kelola yang baik (*Good Coorporate Governance*) senantiasa berlandaskan pada 5 prinsip dasar, yakni :

1. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan Keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara professional tanpa pengaruh / tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengukuran efektifitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan melalui metode *assesment*. Metode *assessment* pengukuran efektifitas pelaksanaan GCG, dapat dilakukan secara :

1. Penilaian Sendiri (*self-assesment*);
2. Penilaian GCG dari Pihak Lain (*third party assesment*).

Pelaksanaan penilaian dikelompokan dalam suatu sistem tata kelola, yaitu:

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (*governance structure*)

   Penilaian struktur dan infrastruktur tata kelola bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan *Stakeholders* BPR. Yang termasuk dalam struktur tata kelola BPR adalah Komisaris, Direksi, Komite dan Satuan Kerja pada BPR. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan prosedur BPR, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur.
2. Proses Penerapan Tata Kelola (*governance process*)

   Penilaian proses penerapan tata kelola bertujuan untuk menilai efektifitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR sehingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan *Stakeholders* BPR.
3. Hasil Penerapan Tata Kelola (*governance outcome*)

   Penilaian hasil penerapan tata kelola bertujuan untk menilai kualitas hasil yang memenuhi harapan *Stakeholders* BPR merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR.

C. VISI, MISI, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN BANK

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diyakini mampu memberikan arahan strategis dalam pencapaian Visi, Misi dan Sasaran yang akan dicapai Bank.

1. Visi, Misi dan Sasaran;

   a) Visi : Menjadi Bank yang terpercaya dan membangun masa depan (TERMAPAN)

   b) Misi :

      1) Mendayagunakan seluruh *asset* perusahaan dengan semaksimal dan seefisien mungkin;
      2) Menjalin kemitraan secara profesional dan saling menguntungkan dengan seluruh *Stakeholders* untuk kelangsungan dan pertumbuhan bisnis;

3) Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki secara kreatif, inovatif dan produktif guna memberikan nilai tambah positif bagi *Stakeholders*;
4) Berperan terhadap masa depan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
5) Berperan dalam pengembangan UMKM dengan memberikan pelayanan yang terbaik.

c) Sasaran yang akan dicapai :

1) Sasaran Kuantitatif;

Menjadi Bank sepuluh teratas pada *cluster* industrinya.

2) Sasaran Kualitatif.

- Bank yang kreatif, inovatif dan produktif.
- Bank yang terhormat.
- Tempat kerja yang nyaman dan menarik.
- Bank yang menarik bagi nasabah.

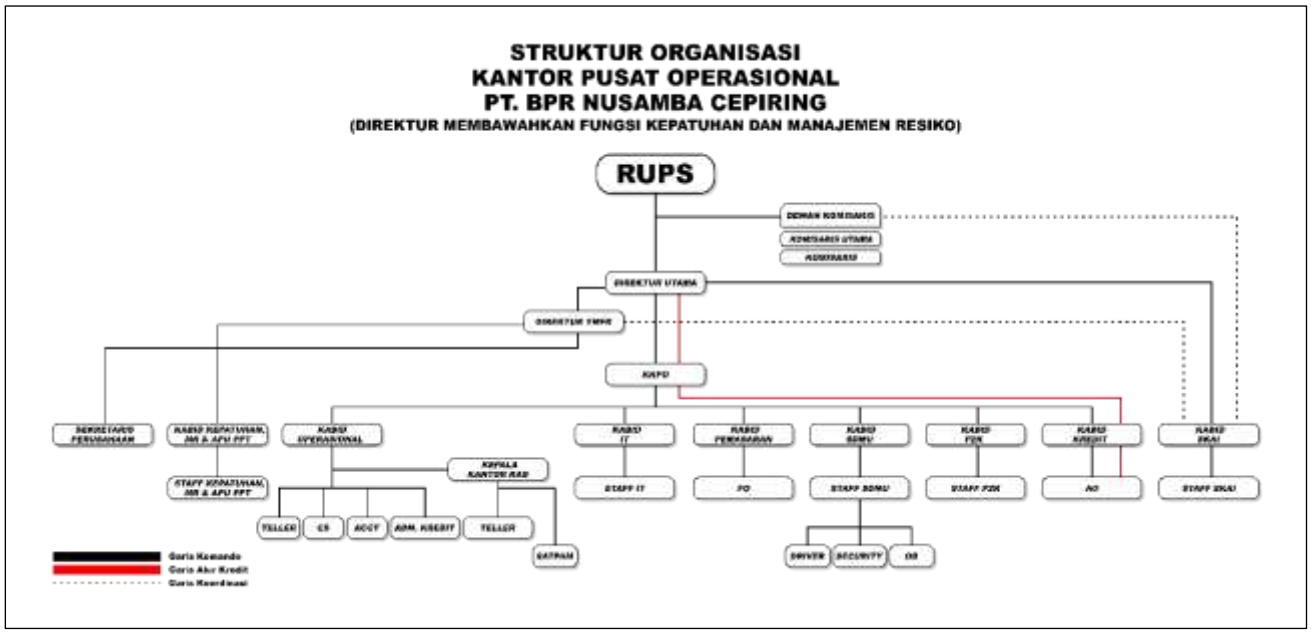
2. Arah Kebijakan Bank

a) Menjalankan usaha Bank dengan prinsip kehati-hatian;
b) Melaksanakan kegiatan usaha secara sehat dengan senantiasa berpedoman pada kebijakan dan prosedur;
c) Melakukan pencatatan dan penyajian laporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada Bank Perekonomian Rakyat;
d) BPR akan fokus pada penyaluran kredit kepada UMKM;

D. STRUKTUR ORGANISASI BANK

Pelaksanaan penerapan tata kelola berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran Manajemen dan Karyawan untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan yang berlaku. Hal ini dapat tercermin dari struktur organisasi Bank yang disusun dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan didasarkan atas kondisi saat ini yang disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan organisasi serta adanya regulasi mengenai penerapan tata kelola yang harus menambah tugas bagian-bagian yang ada. Struktur organisasi Bank ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi NO. 13/NSB-CPR/SK-OPS/XI/2025 tanggal 27 November 2025 tentang Pemberlakuan Struktur Organisasi & *Job Description* Edisi 2025, sebagai berikut :

Gambar Struktur Organisasi PT.BPR Nusamba Cepiring



BPR Nusamba Cepiring memiliki 1 KPO dan 5 Cabang, 11 Kantor Kas yaitu :

1. Kantor Pusat Operasional
    - Kantor Kas Sukorejo
    - Kantor Kas Weleri
    - Kantor Kas Kendal
    - Kantor Kas Pegandon
    - Kantor Kas Cepiring
2. Kantor Cabang Ungaran
    - Kantor Kas Bandungan
    - Kantor Kas Ungaran Barat
3. Kantor Cabang Kaliwungu
4. Kantor Cabang Boja
    - Kantor Kas Limbangan
5. Kantor Cabang Ambarawa
    - Kantor Kas Tuntang
    - Kantor Kas Jambu
6. Kantor Cabang Bergas
    - Kantor Kas Bawen

Sampai bulan Desember 2025, secara keseluruhan jumlah SDM (Termasuk Direksi dan Dewan Komisaris) Berjumlah 236 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Jumlah Karyawan

Pendidikan	Pengurus	Karyawan	Total
S2	3	7	10
S1/ DIV	1	175	176
D3	-	26	26
SMA	-	19	19
SMP	-	5	5
Total	**4**	**236**	**236**

E. PENERAPAN TATA KELOLA BANK

Dalam melaksanakan tata kelola, Bank berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tata kelola dan juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lainnya seperti :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
4. Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
5. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
6. POJK No.9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR & BPRS
7. SEOJK 12 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
8. Anggaran Dasar BPR Nusamba Cepiring beserta perubahan-perubahannya.
9. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Good Corporate Governance BPR Nusamba Cepiring.
10. Pedoman internal BPR Nusamba Cepiring lainya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan laporan pelaksanaan tata kelola yang terdiri atas transparansi pelaksanaan tata kelola dan kesimpulan umum hasil *self-assessment* pelaksanaan tata kelola di BPR Nusamba Cepiring tahun 2025.

BAB II

HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

A. *Self Assessment*

Sesuai dengan Peraturan POJK No.9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR & BPRS serta SEOJK 12 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, maka Bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas implementasi GCG di Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Cepiring. *Self Assessment* tersebut dilakukan terhadap 12 aspek pada posisi Bank per 31 Desember 2025

Kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

Tabel Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

No	Kode Komponen	Faktor	Nilai
1	**F0100**	Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	2
2	**F0200**	Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	3
3	**F0300**	Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	3
4	**F0400**	Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	3
5	**F0500**	Faktor 5: Penanganan benturan kepentingan	2
6	**F0600**	Faktor 6: Penerapan fungsi kepatuhan	3
7	**F0700**	Faktor 7: Penerapan fungsi audit intern	3
8	**F0800**	Faktor 8: Penerapan fungsi audit ekstern	1
9	**F0900**	Faktor 9: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	3
10	**F1000**	Faktor 10: Batas maksimum pemberian kredit	3
11	**F1100**	Faktor 11: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	2
12	**F1200**	Faktor 12: Rencana bisnis	3
13	**F1300**	**Nilai Komposit**	3
14	**F1400**	**Peringkat Komposit**	
15	**F1500**	**Kesimpulan Akhir**	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut signifikan dan perlu diselesaikan dengan tindakan oleh manajemen BPR.
16	**F1600**	**Faktor Positif**	Struktur pemenuhan Faktor Aspek Pemegam Saham, Pelaksanaan Direksi, Pelaksanaan Dewan Komisaris, Benturan Kepentingan, Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Internal, Fungsi Audit ekternal, Penerapan MR & SAF, BMPK, Integritas pelaporan dan TI serta Rencana bisnis terpenuhi sesuai ketentuan. Aspek Governance proses sebagian besar telah terpenuhi sesuai ketentuan sedangkan Governace Outcome secara tata kelola juga sudah terpenuhi secara ketentuan
17	**F1700**	**Faktor Negatif**	Atas dasar pemeriksaan OJK bank melakukan pelanggaran BMPK, Bank belum mengungkapkan benturan kepentingan atas transaksi dengan MHIB dan Penempatan transaksi pihak terkait, masih diperlukan pengkinian keentuan internal, BPR menjalankan kegiatan usaha baru belum mendapatkan perijinan dari Otoritas, Pencapaian laba belum optimal dikarenakan koreksi pembentukan CKPN, Masih banyak terdapat temuan yang harus di tindaklanjuti atas temuan hasil pemeriksaan

Pemeringkatan atas aspek-aspek tersebut diatas didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan oleh OJK. Hasil penilaian dilaksanakan secara penuh sesuai dengan POJK No.9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR & BPRS serta SEOJK 12 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, maka penilaian dilakukan secara total terhadap tata kelola perusahaan berdasarkan pelaksanaan GCG**.** Hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG sesuai dengan Kriteria/Indikator dengan predikat sebagai berikut :

PERINGKAT KOMPOSIT	Predikat Komposit	Definisi
1	Sangat Baik	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola. Tidak terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola dan terdapat upaya manajemen yang berpotensi meningkatkan kinerja BPR. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.
2	Baik	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.
3	Cukup Baik	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.
4	Kurang Baik	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip tata kelola. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh pemegang saham dan manajemen BPR.
5	Tidak Baik	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip tata kelola. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh pemegang saham dan manajemen BPR.

B. Kesimpulan Self Assessment

Berdasarkan kertas kerja *self assessment* tata kelola posisi Desember 2024**,** dapat disampaikan kesimpulan umum hasil *self assessment* penerapan tata kelola PT.BPR Nusamba Cepiring Sebagai berikut :

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Akhir Faktor	**Predikat Komposit**
3	Peringkat 3

Berdasarkan self assessment secara umum penerapan tata kelola Bank telah berjalan dengan baik, Manajemen Bank telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dan telah mempersiapkan struktur tata kelola yang mendukung penerapan tata kelola seperti struktur organisasi, sumber daya manusia yang kompeten dan kebijakan serta prosedur pendukung pelaksanaan aktivitas bank. Selain itu manajemen Bank dari waktu ke waktu juga melakukan upaya-upaya penyempurnaan agar pelaksanaan tata kelola dapat sejalan dengan perkembangan bisnis Bank. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

BAB III

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR	:	PT. BPR Nusamba Cepiring
Alamat	:	Jl Raya Gondang No 30. Cepiring Kendal
Penjelasan Umum	:	Assesment / Penilaian Sendiri mencakup 13 Faktor penilaian sesuai dengan POJK Tata Kelola BPR meliputi : Aspek Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, Komite, Benturan Kepentingan, Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit Ektern, Penerapan Manajemen Risiko & Strategi Anti Fraud, Batas Maksimum Pemberian Kredit, Integritas Pelaporan dan Sistem TI, Rencana Bisnis, Serta Laporan Transparansi Pelaksnaan Tata Kelola.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian (Self Assesment) Tata Kelola	:	Peringkat 3
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian (Self Assesment) Tata Kelola	:	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup oleh manajemen BPR.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	NIK :
	Nama : Bambang Susanto, SE.MM
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab antara lain : 1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank 2. Memastikan terselenggarannya pelaksanaan *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati – hatian. 3. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku 4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya 5. Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. 6. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. 7. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. 8. Terkoodinirnya semua aktifitas BPR, baik bidang operasional, kredit dan pemasaran serta sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya. 9. Tercapainya pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat & efisien. 10. Tercapainya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat. 11. Tercapainya target sesuai anggaran yang telah ditetapkan. 12. Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme. 13. Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi pengawasan intern 14. Memastikan berjalanya penerapan fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko. 15. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi. 16. Mengembangkan budaya kepatuhan dan manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. 17. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia 18. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan kepatuhan dan manajemen risiko dan eksposure risiko yang di ambil BPR secara keseluruhan. 19. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan bank secara efektif dan efisien. 20. Tugas lainya sesuai ketentuan .

2.	NIK	:
	Nama	: Fitrianingsih, SE
	Jabatan	: Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab Antara Lain : 1. Bekerjasama dengan Direktur Utama untuk mengoptimalkan Sumber daya yang ada guna mencapai BPR yang sehat dan efisien serta menerapkan kepatuhan dan manajemen risiko secara optimal 2. Terjaminya pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku. 3. Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi pengawasan intern 4. Memastikan berjalanya penerapan fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko. 5. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan kepatuhan dan manjemen risiko secara tertulis; 6. Mengembangkan budaya kepatuhan dan manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. 7. Mengembangkan budaya kepatuhan dan manajemen risiko telah beroperasi secara independen 8. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan kepatuhan dan manajemen risiko 9. Memastikan bahwa fungsi kepatuhan dan manajemen risiko telah beroperasi secara independen; 10. Bertanggung jawab atas peaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan eksposure risiko yang diambil. 11. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain; 12. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; 13. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain; 14. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; 15. Melaporan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR; dan 16. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR. 17. Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme. 18. Tercapainya target sesuai anggaran yang telah ditetapkan. 19. Tugas lainya sesuai ketentuan .	

Tindak lanjut Rekomendasi dari Dewan Komisaris antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan usaha secara sehat dengan senantiasa berpedoman pada kebijakan dan prosedur;
2. Direksi berusaha memenuhi & merealisasikan komitmen pertumbuhan sesuai dengan anggaran;
3. Direksi telah mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada dan meningkatkan strategi dan melakukan evalauasi agar kredit dan dana pihak ketiga tumbuh optimal.
4. Direksi telah memantau dan mengevaluasi masing-masing cabang mencapai target sesuai komitmen dan direalisasikan masing-masing SDM dan jaringan setiap bulannya.
5. Direksi telah menerapkan tata kelola perusahaan sesuai ketentuan dan menerapkan kepatuhan terhadap regulasi dan mengembangkan budaya patuh terhadap ketentuan intern maupun ekstern.
6. Direksi telah mencanangkan budaya anti fraud antara lain dengan penempelan fletcer anti fraud di setiap jaringan kantor, pembekalan anti fraud untuk karyawan baru, sosialisasi anti fraud, dan kegiatan kerohanian.
7. Direksi telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan OJK dan temuan SKAI
8. Direksi telah mengoptimalkan peran Satuan Kerja Audit Internal dengan fokus pengawasan di lapangan serta tata tertib administratif
9. Direksi telah memantau dan memonitoring terutama tunggakan kredit tidak menjadi Non Performing Loan dan tunggakan bisa turun.
10. Direksi telah melakukan terobosan dalam pemasaran kredit dengan mengembangkan pendekatan ke dalam komunitas.
11. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang;
12. Direksi telah mengupgrade kondisi pasar dan pesaing terkait produk dengan mengevaluasi produk dan suku bunga produk.
13. Direksi terus berupaya memaksimalkan pencapaian dana baik dari tabungan dan deposito dan melakukan strategi untuk pencapaian sesuai target yang diharapkan.
14. Direksi telah memantau dan memonitoring NPL dan upaya yang dilakukan untuk menurunkan NPL .
15. Direksi telah membuat ketentuan internal sesuai kebutuhan serta mengawasi pelaksanaanya.
16. Direksi telah melakukan perhitungan secara berkala terhadap penerapan CKPN sehingga diketahui akibat penerapannya dan melakukan Solusinya.
17. Direksi telah menjalankan manajemen risiko sesuai ketentuan dan terus memantau dan mengevaluasi atas risiko yang timbul di kemudian hari.
18. Direksi telah melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan terkait penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
19. Melakukan pencatatan dan penyajian laporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada BPR;
20. Direksi telah mengadakan Program pendidikan/training bagi seluruh SDM secara berkelanjutan;
21. Direksi Terus melakukan pengembangan dan perbaikan secara berkelanjutan

dari seluruh unit terutama unit pelayanan sehingga tingkat kepuasan nasabah prima dapat tercapai.

22. Direksi telah menyediakan data secara lengkap, dan akurat , terkini dan tepat waktu kepada Komisaris.

2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	NIK :
	Nama : Dwi Yono, SE.MM
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tanggung Jawab: 1. Memastikan Operasional Bank berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalanya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberikan nasehat kepada Direksi 3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. 4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstern 5. Memastikan penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi 6. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko 7. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dalam hal pemberian kredit kepada Pihak Terkait 8. Bertanggungjawab sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank. 9. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Ekternal dan Otoritas Jasa Keuangan. Tugas : 1. Mengawasi kebijakan Direksi 2. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) 3. Menyetujui seluruh Standar Operasional dan Prosedur yang dibuat Direksi 4. Menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat Direksi dan mengkomunikasikanya kepada Pemegang Saham. 5. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan Perekonomian dan melaporkan hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang secara semesteran. 6. Memberikan saran / nasehat kepada Direksi. 7. Mengadakan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Lainya 8. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.

	9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Pemegang Saham Setiap Bulan 10. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang setiap semester 11. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) 12. Melakukan pengawasana atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap usaha Bank dan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 13. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. 14. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstern. 15. Memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukanya : - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan. - Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank 16. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. 17. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko. 18. Mengevalasi rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. 19. Tugas lainya sesuai ketentuan.
2.	NIK : Nama :Joko Suyanto, SE.MM Jabatan : Komisaris Tanggung Jawab: 1. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan Operasional Bank berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalanya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberikan nasehat kepada Direksi 3. Bersama-sama Komisaris Utama Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. 4. Bersama-sama Komisaris Utama Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstern 5. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi 6. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko 7. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dalam hal pemberian kredit kepada Pihak Terkait 8. Bersama-sama Komisaris Utama Bertanggungjawab sesuai ketentuan Undang-

	undang yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank. 9. Bersama-sama Komisaris Utama bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Ekternal dan Otoritas Jasa Keuangan. Tugas : 1. Bersama-sama Komisaris Utama Mengawasi kebijakan Direksi 2. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) 3. Bersama-sama Komisaris Utama menyetujui seluruh Standar Operasional dan Prosedur yang dibuat Direksi 4. Bersama-sama Komisaris Utama menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat Direksi dan mengkomunikasikanya kepada Pemegang Saham. 5. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan Perekonomian dan melaporkan hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang secara semesteran. 6. Bersama-sama Komisaris Utama memberikan saran / nasehat kepada Direksi. 7. Bersama-sama Komisaris Utama mengadakan Rapat Dewan Komisaris & Rapat Lainya 8. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank. 9. Bersama-sama Komisaris Utama menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Pemegang Saham Setiap Bulan 10. Bersama-sama Komisaris Utama menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang setiap semester 11. Bersama-sama Komisaris Utama melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) 12. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan pengawasana atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap usaha Bank dan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 13. Bersama-sama Komisaris Utama memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. 14. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstern. 15. Bersama-sama Komisaris Utama memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukanya : a.Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan. b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank 16. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. 17. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko. 18. Bersama-sama Komisaris Utama mengevalasi rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

	19. Tugas lainya sesesui ketentuan

Rekomendasi kepada Direksi antara lain :

1. Tumbuh Kembang

   - ✓ Upaya-upaya untuk terus menumbuhkan kredit dan dana pihak ketiga agar dilakukan secara optimal
   - ✓ Upaya-upaya untuk menurunkan tunggakan kredit agar dilakukan secara optimal.
   - ✓ Optimalkan Sumber Daya Manusia dan Jaringan kantor agar memberikan kontribusi secara positif.
   - ✓ Monitoring dan Pembinaan terhadap Debitur dilakukan secara rutin.
   - ✓ Penyelesaian Kredit Bermasalah agar dilakukan lebih kongkrit dengan upaya Gugatan Sederhana atau Lelang Jaminan.
   - ✓ Review terhadap suku bunga kredit agar dilakukan secara rutin
   - ✓ Upaya untuk meningkatkan pendapatan agar dilakukan dengan meningkatkan Fee Base Income dan penagihan kredit yang telah dihapusbuku.
   - ✓ Jaringan agar lebih dioptimalkan kinerjanya baik penghimpunan dana maupun peningkatan kredit, melihat peluang pasar dilingkungan sekitar kantor cabang yang masih sangat potensial dan terbuka.
   - ✓ Sinergi dan Team work terus ditingkatkan mulai level Manajemen hingga staf sehingga pertumbuhan dan perkembangan usaha didukung Team Work yang kuat.
   - ✓ Penggunaan Layanan Digital agar ditingkatkan yaitu Virtual Account, EDC, BPR-E Cash.
   - ✓ Produk Tabungan Harmoni Plus (THP), Deposito Super Plus (DSP) dan Kredit Harmoni Plus (KHP) agar dipasarkan secara optimal, karena produk tersebut berbasis hadiah atau biaya.
   - ✓ Lakukan penerapan CKPN dan dampak yang akan terjadi terhadap penerapannya.
   - ✓ Agar memperhatikan ketentuan mengenai One Obligor dan ketentuan pelanggaran atau pelampauan BMPK

2. Penanganan Masalah Yang Sedang dihadapi Bank

   - ✓ Pertumbuhan Asset, BPR selalu mengoptimalkan dengan peningkatan sumber dana pihak ketiga yaitu Tabungan dan Deposito, dengan selalu berinovasi dan meningkatkan produktivitas semua jaringan;
   - ✓ Perlakuan ketentuan POJK No. 1 tahun 2024 harus dilakukan dengan baik dan supaya dipahami dalam penanganan maintenance nasabah dan segi pengikatan jaminannya.
   - ✓ Penanganan kredit dalam kategori NPL maupun tunggakan 1, 2 & 3 agar lebih ditingkatkan lagi sehingga jumlah NPL dan jumlah tunggakan kredit bisa ditekan,
   - ✓ Kinerja dari bagian Pembinaan dan Pengawasan Kredit agar lebih

dioptimalkan dalam menyelesaikan kredit-kredit yang masuk kategori NPL harus lebih baik lagi karena potensial tunggakan kredit masih cukup besar

- ✓ Terus diupayakan peningkatan dana masyarakat baik Tabungan dan Deposito, dengan selalu melakukan promosi-promosi kepada nasabah baru
- ✓ Penanganan kredit yang telah dihapus buku agar selalu dilakukan penagihan secara berkala. Tim PPK di seluruh jaringan agar membuat action plan terhadap penagihan kredit yang telah hapus Buku.
- ✓ Optimalisasi seluruh SDM baik bagian marketing maupun operasional yang telah ada dalam memasarkan seluruh produk yang ada di BPR Nusamba Cepiring sehingga pos-pos inti neraca dapat tercapai sesuai dengan target RBB tahun 2025.
- ✓ Peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas bagi Manajemen.
- ✓ Peningkatan produktivitas untuk staf PPK, untuk antisipasi terhadap tunggakan kredit 1-3, sehingga tidak masuk menjadi kolektibilitas.

3. Strategi dan Complience

- ✓ Manajemen beserta jajarannya diharapkan segera melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah diterapkan agar dapat tumbuh dan mencapai target yang diharapkan.
- ✓ Manajemen agar selalu melakukan review terhadap fitur produk kredit,tabungan maupun deposito agar diminati masyarakat namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, Likuiditas serta Cost Of Money
- ✓ Konsistensi atas penerapan ketentuan-ketentuan yang ada.
- ✓ Pemahanan dan Sosialisasi atas pemberlakuan ketentuan agar dilakukan terhadap karyawan maupun nasabah.
- ✓ Dalam peningkatan Volume KYD harus memperhatikan kualitas kredit tetap dalam kondisi baik, dengan meningkatkan penajaman terhadap analisa kredit.
- ✓ Monitoring terhadap Kredit lancar tunggakan 1, 2 dan 3 agar lebih ditingkatkan.
- ✓ Mengoptimalkan fungsi dan peran Kantor Cabang dalam memberikan kontribusi secara positif baik pendanaan maupun penyaluran dana.
- ✓ Pemasaran terhadap produk unggulan seperti Tabungan Hormoni Plus dan Deposito Plus agar lebih dioptimalkan dengan media yang ada .
- ✓ Untuk meningkatkan Laba agar meningkatkan produktifitas Sumber Daya manusia yang ada dan Optimalisasi jaringan.
- ✓ Kompetensi dan Integritas SDM baik Operasional maupun Pemasaran Dana dan kredit, perlu ditingkatkan melalui In House Training atau pelatihan.
- ✓ Terus dilakukan upaya-upaya penagihan terhadap kredit yang telah dihapus bukukan.
- ✓ Tingkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan usaha Debitur.
- ✓ Optimalkan fungsi dan peran Internal Auditor.
- ✓ Praktek-praktek yang tidak sehat dalam menjaga kualitas kredit agar diberhentikan segera, karena dapat menimbulkan fraud.
- ✓ Direksi harus berani melakukan tindakan tegas terhadap pejabat atau karyawan yang tidak memiliki performa sesuai dengan upaya-upaya untuk

meningkatkan kinerja.

- ✓ Direksi diharapkan menerapkan peraturan perusahaan secara seimbang antara Reward dan punishment.
- ✓ Peningkatan status kantor kas menjadi kantor Cabang agar bisa segera direalisasikan secepatnya.
- ✓ Bank diharapkan merealisasikan program digitalisasi perbankan yaitu Virtual Account, EDC/MC, BPR E-Cash.
- ✓ Monitoring kredit yang mengalami tunggakan 3 agar terus dioptimalkan, karena berpotensi menjadi kredit Non Performing jika tidak dilakukan upaya-upaya -upaya Lakukan Gelar Kredit Lancar (GKL) secara rutin untuk mencegah menurunnya kredit lancar menjadi kredit bermasalah
- ✓ Upaya2 penyelesaian kredit yang bermasalah dengan prioritas yang masih memungkinkan untuk diselesaikan dengan melalui Gugatan Sederhana atau Lelang Jaminan bekerjasama dengan pihak ketiga (lawyer dan LBH)
- ✓ Memanfaatkan dan menggunakan big data internal dan eksternal untuk digunakan riset dan development dalam rangka meningkatkan NOA kredit.
- ✓ Lakukan perhitungan secara berkala terhadap penerapan CKPN sehingga diketahui akibat penerapannya dan melakukan Solusinya.
- ✓ Agar memperhatikan ketentuan mengenai Pelanggaran/Pelampauan BMPK dan One Obligor.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) POJK Tata Kelola BPR, dalam rangka melaksanakan Tata Kelola dengan modal inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit 3 komite yaitu :

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Remunerasi dan Nominasi

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite*)
1	Komite Audit
	Tugas & Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas & Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi & Nominasi
	Tugas & Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
4	Komite Manajemen Risiko
	Tugas & Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
5	Komite Lainya**)
	Tugas & Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

Jumlah modal inti BPR Nusamba Cepiring pada posisi akhir tahun 2025 adalah Rp. 27.256.617.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) "Sebelum *Audit KAP*",sehingga tidak diwajibkan membentuk 3

kriteria di atas Sehingga dalam pelaksanaanya ***BPR Nusamba Cepiring belum membentuk Komite Audit Komite Pemantau Risiko & Komite Remunerasi & Nominasi***.

4. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, Independensi Anggota Komite

No	NIK*)	Nama	Keahlian	Komite ***)					Pihak Independen (Ya/ Tidak)
				Audit	*Pemantau Risiko*	*Remunerasi & Nominasi*	*Manajemen Risiko*	*lainya*	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI & ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Prosentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Prosentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1		Bambang Susanto	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*
2		Fitrianingsih	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

No	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Prosentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Prosentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1		Dwi Yono	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*
2		Joko Suyanto	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*

D. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI & ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Prosentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Prosentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1		Bambang Susanto	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*
2		Fitrianingsih	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan Lain

No	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Prosentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Prosentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1		Dwi Yono	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*
2		Joko Suyanto	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi Pada BPR

No	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1		Bambang Susanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2		Fitrianingsih	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

No	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1		Dwi Yono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2		Joko Suyanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi Pada BPR

No	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga**)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1		Bambang Susanto	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*
2		Fitrianingsih	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

No	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga**)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1		Dwi Yono	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*
2		Joko Suyanto	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*

G. PAKET /KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/ kebijakan remunerasi Direksi & Dewan Komisaris

NO	JENIS REMUNERASI (DALAM 1 TAHUN)	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp.)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp.)
1	Gaji*)	2	969.000.000	2	427.500.000
2	Tunjangan	2	192.200.000	2	34.800.000
3	Tantiem	2	127.500.000	2	63.750.000
4	Kompensasi berbasis saham	2	Tidak Ada	2	Tidak Ada
5	Remunerasi Lainya**)	2	Tidak Ada	2	Tidak Ada
	Total Remunerasi		1.288.700.000		526.050.000
NO	**Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)**	**Jumlah Orang**	**Jumlah Keseluruhan (Rp.)**	**Jumlah Orang**	**Jumlah Keseluruhan (Rp.)**
1	Perumahan	2	Tidak Ada	2	Tidak Ada
2	Transportasi	2	152.400.000	2	Tidak Ada
3	Asuransi Kesehatan	2	11.250.000	1	5.760.000
4	Fasilitas Lainya ***)	2	39.395.094	2	28.303.703
	Total		203.045.094		34.063.703

Keterangan :

RUPS yang dilaksanakan adalah pelaksanaan RUPS di tahun 2025. Sampai dengan Bulan Maret 2026 belum diselenggarakanya RUPS tahunan atas Pertanggungjawaban Kinerja Tahun 2025. RUPS Tahunan akan di selenggarakan maksimal sesuai ketentuan, maksimal 6 bulan setelah tahun berakhir.

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

1. Rasio gaji tertinggi da terendah dalam perbandingan

Keterangan *)	Perbandingan**)
Rasio gaji pegawai tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	7 : 1
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2 : 1

Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3 : 1

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1.	13 Januari 2025	2	Rapat Evaluasi Atas Kinerja BPR Periode Desember 2024, topik rapa tantara lain : - Penerapan SAKEP dalam bisnis - Simulasi perhitungan CKPN - Pengelolaan tata kelola jaringan - Strategi pengendalian biaya bunga - Tindak lanjut pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan - Perubahan Nomenklatur
2.	12 Februari 2025	2	Rapat Evaluasi Atas Kinerja BPR Periode Januari 2025, topik rapa tantara lain : - Risiko bisnis - Profil risiko higrisk diminimalisasikan - Mitigasi risiko kredit - Efisiensi Bank - Komitmen atas RBB - Pilar2 pengembangan usaha - Pelaporan ke PPATK - Penerapan SAF
3.	11 Maret 2025	2	Rapat Evaluasi Atas Kinerja BPR Periode Februari 2025, topik rapa tantara lain : - Peningkatan sumber dana - Produk dan riset - Kebijakan Manjemen Risiko - Pelaksanaan RUPST - Prosedur Perkreditan - Pengkinian data - Tantangan Merger - Pelaporan & Integritas laporan keuangan - Pelaksanaan RKAB
4.	10 April 2025	2	Rapat Evaluasi Atas Kinerja BPR Periode Maret 2025, topik rapa tantara lain : - Pelaksanaan RUPST - Performance setelah hari raya

			- SDM - Jaringan kantor - Pengkinian data
5.	09 Mei 2025	2	Rapat Evaluasi Atas Kinerja BPR Periode April 2025, topik rapa tantara lain : - Strategi pertumbuhan dana - Performance Bulan April - Produk dan riset - Optimalisasi SDM - Perkembangan Tekhnologi - Pencapaian RBB
6.	18 Juni 2025	2	Rapat Evaluasi Atas Kinerja BPR Periode Mei 2025, topik rapa tantara lain : - Kinerja Bank - Kerjasama pihak 3 - Strategi penyelesaian NPL - Fungsi pengawasan SKAI - Kebijakan APUPPT - Penerapan Manajemen Risiko - Penyesuaian POJK Integritas Pelaporan Keuangan - Kebijakan LAR
7.	15 Juli 2025	2	Rapat Evaluasi Atas Kinerja BPR Periode Juni 2025, topik rapa tantara lain : - Kinerja Bank & Efisiensi - Pertumbuhan kredit & pendapatan - FGD terkait evaluasi pemberian suku bunga - Evaluasi kebijakan direksi - Manajemen SDM - Analisa kredit - Upaya hukum terhadap nasabah wanprestasi
8.	11 Agustus 2025	2	Rapat Evaluasi Atas Kinerja BPR Periode Juli 2025, topik rapa tantara lain : - Kinerja Bank & Strategi pencapaian pos-pos inti neraca - Konsolidasi BPR - Implementasi CKPN - Prudential Bangking - Sertifikasi SDM - Optimalisasi fungsi SKAI - Budaya Kepatuhan - Laporan ke PPATK
9.	10 September 2025	2	Rapat Evaluasi Atas Kinerja BPR Periode Agustus 2025, topik rapa tantara lain : - Konsolidasi BPR - Pemeriksaan Jaringan kantor & tindak lanjut merger - Fit & Proper Calon pengurus

			- Kesiapan Jaringan. - Pemantauan APUPPT
10.	15 Oktober 2025	2	Rapat Evaluasi Atas Kinerja BPR Periode September 2025, topik rapa tantara lain : - Isu Nasional - Pemahaman SAK EP - Penanganan NPL - Mitigasi risiko - Pelatihan Karyawan - Monitoring kredit
11.	06 November 2025	2	Rapat Evaluasi Atas Kinerja BPR Periode Oktober 2025, topik rapa tantara lain : - Pengelolaan asset - Strategi bisni bank - Pertumbuhan dan efisiensi - Penanganan kredit bermasalah - Mitigasi risiko - Kepemimpinan
12.	05 Desember 2025	2	Rapat Evaluasi Atas Kinerja BPR Periode November 2025, topik rapa tantara lain : - RBB - Leadership - Tantangan bisnis kedepan - Tindak lanjut Audit OJK

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

NO	NIK *)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran **) (dalam %)
			Fisik	Teleconfrensi	
1.		Dwi Yono	12	-	100%
2.		Joko Suayanto	-	12	100%

Selain itu, Dewan Komisaris juga secara berkala mengundang Direksi dan seluruh Pejabat Bank untuk melaksanakan rapat koordinasi membicarakan kinerja secara umum, Selama periode 2025 rapat yang dihadiri Dewan Komisaris :

Tabel Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi & Pejabat bank

No	Rapat	Pelaksanaan	Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1.	Rapat Koordinasi Dewan Komisaris & Direksi	Periodik Bulanan	- Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur	- Evaluasi Kinerja Bulanan - Rencana kerja dan pengembangan - tindak lanjut temuan hasil audit, - isu-isu strategis/penetapan kebijakan strategis.
2.	Rapat Koordinasi Dewan Komisaris, Direksi dan Seluruh Pejabat Bank	Periodik Bulanan	- Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur - Seluruh Pejabat Bank	- Evaluasi Kinerja Bulanan - Rencana kerja dan pengembangan - tindak lanjut temuan hasil audit, - isu-isu strategis/penetapan kebijakan strategis.
3.	Rapat Koordinasi Hasil Pemeriksaan SKAI	Periodik Bulanan	- Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur - Kabid SKAI - Staff SKAI	Pembahasan hasil pemeriksaan dan rekomendasi SKAI, Audit Eksternal, dan Tindak lanjut hasil Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
4.	Rapat Koordinasi Penerapan Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APUPPT	Periodik Bulanan	- Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur - Kabid Kepatuhan,MR & APUPPT - Staff Kepatuhan,MR & APUPPT	Pembahasan pelaksanaan ,pemantauan dan pengawasan penerapan kepatuhan, Manajemen risiko dan APU-PPT

Hasil rapat dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik.

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal *(dalam 1 tahun)*	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total *fraud*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*
Telah diselesaikan		*Nihil*		*Nihil*		*Nihil*		*Nihil*
Dalam proses penyelesaian diinternal BPR	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*
Belum Diupayakan Penyelesaianya	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*	*Nihil*
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		*Nihil*		*Nihil*		*Nihil*		*Nihil*

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	9	*1*
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	9	1

Keterangan :

Dalam periode 2025 terdapat permasalahan hukum baik perdata maupun pidana, dalam hal perdata merupakan perkara gugatan sederhana dari pihak Bank kepada Debitur yang dilaksanakan di Pengadilan Negri Kendal dan Pengadilan Negri Kabupaten Semarang akibat ingkar janji (wanprestasi). Sedangkan dalam permasalahan hukum pidana selain akibat ingkar janji (wanprestasi), adanya upaya dari debitur untuk menghilangkan aset yang telah dijaminkan kepada bank.

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan/ Keterangan	NIK	Nama	Jabatan/ Keterangan	NIK			
1	PT Sentra Modal Harmoni	Pemegang Saham Pengendali	-	PT. BPR Nusamba Cepiring	Entitas BPR	-	Sewa Mobil	639,360	Sewa 10 Kendaraan Untuk Operasional (Telah dilakukan cost & benefit dan data pembanding)
2	PT Sentra Modal Harmoni	Pemegang Saham Pengendali	-	PT. BPR Nusamba Cepiring	Entitas BPR	-	Sewa Gedung	59,940	Sewa Gedung Untuk Kantor Pusat
3	PT Mitra Harmoni Insurance Broker	Group dari PT Sentra Modal Harmoni (Pemegang Saham Pengendali	-	PT. BPR Nusamba Cepiring	Entitas BPR	-	Assuransi Jiwa, Asuransi Kebakaran & Asuransi Kendaraan	407,700 26,610	Asuransi Jiwa selama th 2025 Asuransi Kendaraan dan Gedung Mei 2025-Mei 2026
4	Sukhidin Aji	Direktur PT Sentra Modal Harmoni	-	Sri Kusumawati	Kacab Kaliwungu	-	Penempatan Deposito	410.000	Penempatan Deposito (4 bilyet Deposito)
5	Loius Hariman	Komisaris PT Sentra Modal Harmoni	-	PT. BPR Nusamba Cepiring	Entitas BPR	-	Penempatan Deposito	2.000.000	Penempatan Deposito (4 bilyet Deposito)

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Total
1.	Setiap awal bulan	Program bina lingkungan dan sosial	Beasiswa & santunan santri PA NU Pegandon th 2025	PA NU Tegorejo Pegandon	Rp 42.000.000
2	Setiap pertengahan bulan	Program bina lingkungan dan sosial	Sumbangan desa gondang kec. cepiring	Kantor Desa Gondang Kec. Cepiring	Rp 18.000.000

3	12-Dec-25	Program bina lingkungan dan sosial	Donasi peduli bencana sumatera	Perbarindo Jawa Tengah	Rp 1.000.000
4	17-Feb-25	program langsung pada masyarakat	Pembagian sembako hut BPR nusamba cepiring ke 35 th	Masyarakat Desa Gondang Cepiring	Rp 57.400.000
5	02-Apr-24	program langsung pada masyarakat	Pembagian paket sembako PERTUNI dan santunan tali asih	Aggota PERTUNI Kabupaten Kendal	Rp 60.954.500
6	13-Mar-25	program langsung pada masyarakat	Pembagian paket al qur'an dan sajadah	Pengurus masjid & mushola Kab Kendal & Semarang	Rp 27.560.000
7	16-Jun-25	program langsung pada masyarakat	Sumbangan sapi qurban	Masjid Al Falah Desa Gondang Cepiring	Rp 25.600.000
Total					Rp 232.514.500

Keterangan :

Selama tahun 2025 Bank tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik , Bank hanya memberikan dana untuk kegiatan sosial. Pemberian bantuan dana kegiatan sosial yang dilakukan oleh BPR Nusamba Cepiring merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial berupa sumbangan dan donasi lainya.

BAB IV

PENUTUP

Demikian laporan penerapan tata kelola PT. BPR Nusamba Cepiring tahun 2025 untuk periode penilaian 31 Desember 2025, disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor No.9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR & BPRS serta SEOJK 12 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR , yang telah mengungkapkan aspek transparansi pelaksanaan penerapan tata kelola dan penilaian sendiri *(Self-Assesment)* penerapan tata kelola sesuai dengan periode penilaian 31 Desember 2025.

Dengan disusunnya Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada *Stakeholder* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggung jawaban dan kewajaran Bank.

Kendal , 10 Maret 2026

PT. BPR NUSAMBA CEPIRING

Bambang Susanto, SE. MM	**Dwi Yono, SE. MM**
Direktur Utama	Komisaris Utama